2.3.1. Analisis Capaian Kinerja Tujuan 1 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Hasil pengukuran atas target dan realisasi atas Indikator Kinerja Utama tujuan pembangunan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang merupakan penjabaran dari Misi I menempatkan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) sebagai Indikator Kinerja Utama.

Capaian Misi I Kabupaten Sekadau yakni Meningkatkan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan berkualitas dengan Tujuan Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan yang direpresentasikan melalui IKU Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) yang sampai pada saat penyusunan belum di rilis oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi diukur dengan Sembilan Indikator sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3.1.1

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2021

Indikator Tujuan/Sasaran			Tahun 2021		
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan					
1.	**Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)**	**Indeks**	**CC**	n/a	n/a
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya integritas dan budaya kinerja Aparatur					
1	Nilai manajemen perubahan (Indeks Kepemimpinan perubahan)	Nilai	3,03	2	66,01%
Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Penataan peraturan perundang-undangan di daerah					
1	Nilai Peraturan Perundang-undangan (Indeks Reformasi Hukum, indeks kebijakan)	Nilai	4,3	4,05	94,19%
Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Penataan Kapasitas Organisasi					
1	Nilai Penataan dan Penugasan Organisasi (Indeks Kelembagaan)	Nilai	5,5	4,09	74,36%
Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya penataan tatalaksana Pemerintahan daerah					

1	Nilai Penataan tatalaksana (Indeks SPBE, Indeks Pengelolaan Keuangan, Indeks Pengawasan Kearsipan, Indeks Pemerintah Daerah, Indeks Pengelolaan Aset)	Nilai	6,96	3,82	54,89%
Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Penataan SDM Aparatur					
1	Nilai penataan sistem manajemen SDM (Indeks Merit System,Indeks Profesionalitas ASN,Indeks tatakelola Manajemen ASN)	Nilai	4,63	4,24	91,58%
Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah					
1	Penguatan Akuntabilitas (Indeks Perencanaan, Nilai SAKIP)	Nilai	12,35	12,06	97,65%
Sasaran Strategis 7 : Menurunya Temuan Hasil Pemeriksaan					
1	Nilai Pengawasan (Kapabilitas APIP, Maturitas SPIP,Indeks Tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa, Opini BPK)	Nilai	5,19	3,32	63,97%
Sasaran Strategis 8 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik					
1	Nilai peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Indeks Pelayanan Publik, Hasil Survey Kepuasan Masyarakat)	Nilai	14,07	5,26	37,38%
Sasaran Strategis 9 : Meningkatnya Penataan Administrasi Kependudukan Kab Sekadau					
1	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el)	%	96	96	100,00%
2	Banyaknya jumlah perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan dan dokumen kependudukan pertahun	Jumlah	1	1	100,00%

Indeks Reformasi Birokrasi diperoleh dari Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara online oleh Tim PMPRB Kabupaten. Hasil penilaian Tim PMPRB Kabupaten yang sudah ditetapkan dan disahkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau, kemudian dilakukan penilaian / dievaluasi oleh Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Berdasarkan hasil evaluasi / penilaiaan Tim PMPRB pada tahun 2019, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sekadau sebesar 53.37 persen, sedangkan hasil evaluasi / penilaian Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Untuk capaian Nilai Reformasi Birokrasi Tahun 2021 belum dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pencapaian kinerja reformasi birokrasi target didukung oleh :

a. Untuk mewujudkan reformasi birokrasi, tahapan yang telah dilakukan yaitu menyusun roadmap, coaching dan asistensi pelaksanaan roadmap sebagai implementasi program reformasi birokrasi;
b. Upaya Pemerintah Kabupaten Sekadau dalam melakukan reformasi birokrasi antara lain mewujudkan pelayanan publik yang cepat, tepat, prima, dan transparan kepada masyarakat serta meningkatkan juga taraf kehidupan aparaturnya;
c. Indikator-indikator sasarannya yang telah dilakukan adalah bebas kolusi, korupsi dan nepotisme, perbaikan pelayanan publik dan peningkatan kinerja.

Indikator Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), mencapai target dikarenakan:

a. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) laporan keuangan, telah memenuhi syarat-syarat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern;
b. Pelaporan keuangan telah berbasis Akrual (*Accrual Basis*) yaitu akuntansi yang memberikan gambaran lebih akurat dan kompleks atas kondisi keuangan organisasi, karena telah mencatat semua transaksi pengeluaran dan penerimaan kas serta jumlah hutang dan piutang.

Dalam rangka mencapai tujuan meningkatkan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa salah satu sasarannya adalah meningkatnya akuntabitas, baik akuntabilitas kinerja maupun akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas keuangan telah memperoleh

predikat Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama enam tahun terakhir berturut-turut

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah..

Berdasarkan tabel di atas, target Kinerja tahun 2020 ditarget kan dengan predikat BB. Dari hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Sekadau Tahun 2019 berdasarkan Surat kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/535/AA.05/2019 tanggal 30 Desember 2019 dengan Predikat B atau dengan nilai 61,04. Untuk realisasi pada tahun 2020 sampai dengan bulan Maret 2021, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara belum merilis hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Sekadau untuk tahun 2020, sehingga tidak dapat dilakukan penilaian capaian kinerja untuk indikator kinerja utama SAKIP kabupaten

Tabel 2.3.1.2

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No.		Tujuan / Sasaran Strategis / Program	Anggaran (Rp)			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1.		***Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan***	**568.931.451.219**	**552.332.024.410**	**97%**	**100,26%**	**103,27%**
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.897.551.932	1.377.128.500			
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	27.731.256.404	27.384.132.171			
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	9.284.768.281	8.889.341.550			
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	226.223.699	226.223.699			
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	141.597.304.994	140.634.744.007			
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.142.828.217	1.054.900.600			
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	393.638.898	*			
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	0	274.555.010			
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	125.374.606	104.552.900			
		Program Peyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	106.474.251	95.822.693			
		Program Pengelolaan Arsip	118.164.422	96.945.900			
		Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	30.827.200	23.188.500			
		Program Perizinan Penggunaan Arsip	0				
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	27.731.256.404	27.384.132.171			
		Program Kepegawaian Daerah	1.176.924.946	972.667.000			
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.339.316.103	1.270.541.065			
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	283.576.028	273.224.492			
		Program Penelitian Dan Pengembangan	359.278.277	515.291.300			
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	351.072.936.883	319.642.345.299			
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	0	17.637.072.768			
		Program Perekonomian dan Pembangunan	919.461.928	887.953.470			
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.558.541.442	1.475.504.828			
		Program Perumusan Kebijakan,Pendampingan Dan Asistensi	409.192.034	372.004.950			
		Program Perekonomian dan Pembangunan	0	0			
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	393.638.898	393.638.898			
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	685.127.191	681.029.855			
		Program Penelitian Dan Pengembangan	190.266.645	515.291.300			
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	90.429.500	90.429.500			
		Program Pendaftaran Penduduk	21.228.036	17.813.984			
		Program Pencatatan Sipil	4.000.000	3.950.000			
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi	38.264.000	34.288.000			
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	3.600.000	3.310.000			

Dengan memperhatikan tabel diatas, realisasi anggaran yang diserap guna mendukung peningkatan Kualitas Tata kelola pemerintahan cukup tinggi mancapai 97 % dari target anggaran yang tersedia. Dengan tingkat efisiensi sebesar 103,27 %

Tabel 2.3.1.3

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan target Akhir RPJMD

NO	Tujuan/Sasaran Strategis	IKU	Satuan	KINERJA TAHUN 2021			Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
I	**Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan**	***Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)***	***Indeks***	CC	*n/a*	*n/a*	*BB*
1	Meningkatnya integritas dan budaya kinerja Aparatur	Nilai manajemen perubahan (Indeks Kepemimpinan perubahan)		3,03	2	66,01%	4,00
2	Meningkatnya Penataan peraturan perundang-undangan di daerah	Nilai Peraturan Perundang-undangan (Indeks Reformasi Hukum, indeks kebijakan)		4,3	4,05	94,19%	5,00
3	Meningkatnya Penataan Kapasitas Organisasi	Nilai Penataan dan Penugasan Organisasi (Indeks Kelembagaan)		5,5	4,09	74,36%	5,50
4	Meningkatnya penataan tatalaksana Pemerintahan daerah	Nilai Penataan tatalaksana (Indeks SPBE, Indeks Pengelolaan Keuangan, Indeks Pengawasan Kearsipan, Indeks Pemerintah Daerah, Indeks Pengelolaan Aset)		6,96	3,82	54,89%	11,35
5	Meningkatnya Penataan SDM Aparatur	Nilai penataan sistem manajemen SDM (Indeks Merit System,Indeks Profesionalitas ASN,Indeks tatakelola Manajemen ASN)		4,63	4,24	91,58%	8,01
6	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Penguatan Akuntabilitas (Indeks Perencanaan, Nilai SAKIP)		12,35	12,06	97,65%	15,50
7	Menurunya Temuan Hasil Pemeriksaan	Nilai Pengawasan (Kapabilitas APIP, Maturitas SPIP,Indeks Tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa, Opini BPK)		5,19	3,32	63,97%	14,20
8	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Indeks Pelayanan Publik, Hasil Survey Kepuasan Masyarakat)		14,07	5,26	37,38%	15,60
9	Meningkatnya Penataan Administrasi Kependudukan Kab Sekadau	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el)		96	96	100,00%	98,50
		Banyaknya jumlah perjanjian kerjasama pemanfaatan data kepnedudukan dan dokumen kependudukan pertahun		1	1	100,00%	6,00

2.3.2. Analisis Capaian Kinerja Tujuan 2 Meningkatkan derajat kualitas sumber daya manusia

Capaian Misi 2 Kabupaten Sekadau dengan Tujuan Meningkatkan derajat kualitas sumber daya manusia yang direpresentasikan melalui IKU Indeks Pembangunan Manusia mencapai kinerja yang cukup baik yakni sebesar 64,93 dari target sebesar 64,76 dengan capaian 100.3%. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sekadau pada tahun 2021 mencapai 64,93, meningkat 0,17 poin (0,26 persen) dibandingkan capaian tahun sebelumnya (64,76). Selama 2010-2021, IPM Sekadau rata-rata meningkat sebesar 0,83 persen.

Tabel 2.3.2.1

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2021

Indikator Tujuan/Sasaran		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Tujuan 2 : Meningkatkan derajat kualitas sumber daya manusia					
1.	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	Indeks	**64,76**	64,93	100,26%
Sasaran Strategis 10 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat					
1	Angka Harapan Hidup	Angka	71,84	72,05	100,29%
Sasaran Strategis 11 : Meningkatnya Kualitas Pemuda					
1	Indeks Pembangunan pemuda	Indeks	n/a	n/a	n/a
Sasaran Strategis 12 : Meningkatnya prestasi keolahragaan					
1	Indeks pembangunan keolahragaan	Indeks	35,71	14,67	41,08%
Sasaran Strategis 13 : Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat					
1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,9	11,89	99,92%
2	Rata-rata lama sekolah	Tahun	6,86	6,85	99,85%
Sasaran Strategis 14 : Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Masyarakat					
1	Pengeluaran Penduduk Per Kapita	Juta Rp.	7. 434	7,462	110,79%
Sasaran Strategis 15 : Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender					
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	83,87	82,92	98,87%

Peningkatan IPM 2021 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Hal ini berbeda dengan peningkatan IPM 2020 yang hanya didukung oleh peningkatan pada dimensi umur panjang dan hidup sehat dan dimensi pengetahuan, sedangkan dimensi standar hidup layak mengalami penurunan. Pada 2021, dimensi hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan) meningkat 0,38 persen. Pada dimensi pendidikan, pada tahun 2021 penduduk berusia 7 tahun memiliki harapan lama sekolah (dapat menjalani pendidikan formal) selama 11,89 tahun, atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat kelas 3 SMA. Angka ini meningkat 0,01 tahun dibanding tahun 2020 yang mencapai 11,88 tahun. Sementara itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,02 tahun menjadi 6,85 tahun pada tahun 2021. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2021 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 72,05 tahun, lebih lama 0,21 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.

Pembangunan manusia di Sekadau terus mengalami kemajuan. Selama 2010-2021, IPM Sekadau rata-rata meningkat sebesar 0,81 persen per tahun dari 59,42 pada tahun 2010 menjadi 64,93 pada tahun 2021. Setelah mengalami perlambatan pada tahun 2020 karena pandemi COVID-19, peningkatan IPM Sekadau sudah kembali membaik pada tahun 2021 seiring dengan perbaikan kinerja ekonomi yang berpengaruh positif terhadap indikator pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan). Capaian IPM tahun 2021 yang meningkat 0,17 poin di tahun 2021 didukung oleh peningkatan semua komponen penyusunnya. Hal ini berbeda dengan tahun 2020 yang mengalami perlambatan akibat penurunan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Perubahan IPM selama satu dekade terlihat

dari Gambar berikut, sedangkan perubahan komponen penyusunnya dapat terlihat dari Tabel berikut

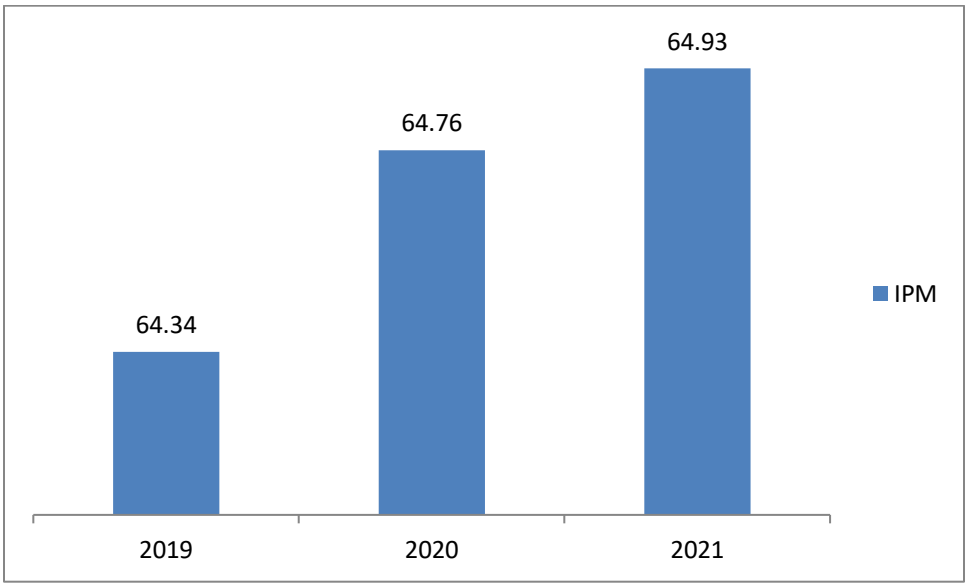

Gambar 1. Grafik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sekadau Menurut Komponen, 2019- 2021

Tabel 2.3.2.2

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sekadau Menurut Komponen, 2019-2021

Komponen	**Satuan**	**2019**	**2020**	**2021**
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	71,65	71,84	72,05
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	11,57	11,88	11,89
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	6,60	6,83	6,85
Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (PPP)	Rp 000	7.640	7.434	7.462
IPM		**64,34**	**64,76**	**64,93**

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2010 hingga 2021, UHH telah meningkat sebesar 1,37 tahun atau rata-rata tumbuh

sebesar 0,17 persen per tahun. Pada tahun 2010, Umur Harapan Hidup saat lahir di Sekadau adalah 70,68 tahun, dan pada tahun 2021 mencapai 72,05 tahun.

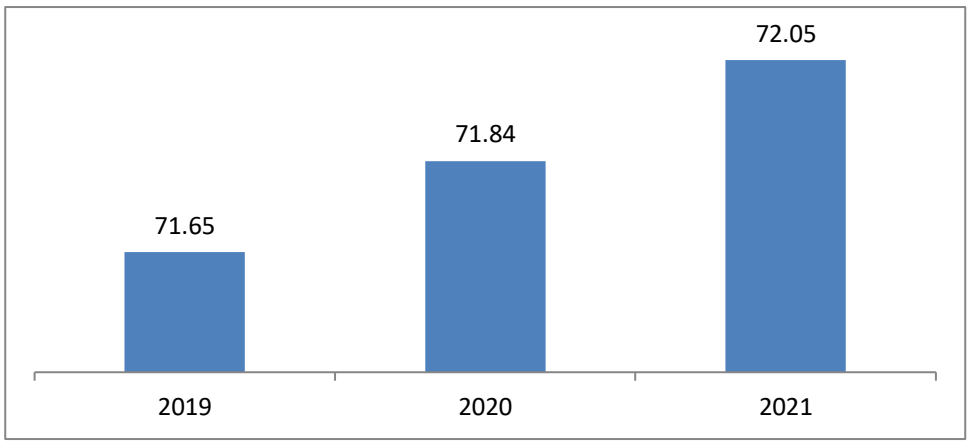

Gambar 2. Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Sekadau, 2010-2021

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun, meski pada saat pandemi COVID-19 mengalami sedikit perlambatan. Selama periode 2010 hingga 2021, HLS Sekadau rata-rata meningkat 1,33 persen per tahun, sementara RLS meningkat 1,70 persen per tahun.

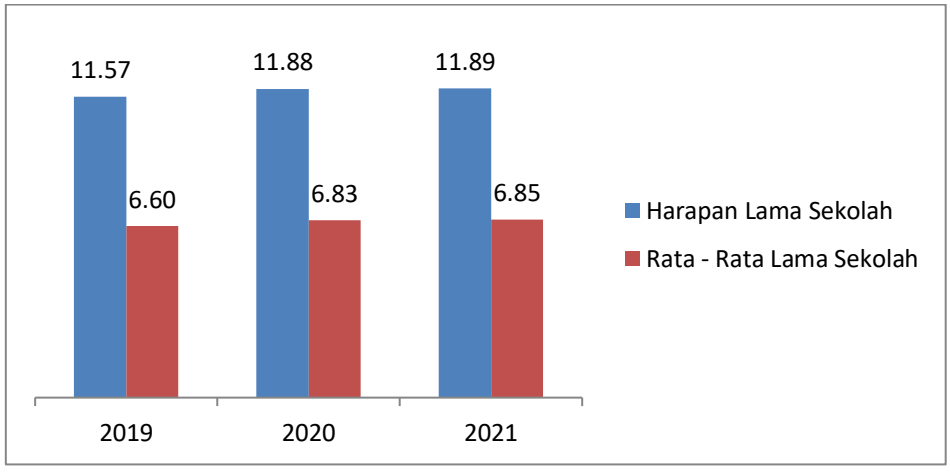

Gambar 3. Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Sekadau, 2010-2021

Berdasarkan data yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021-2026, kondisi awal tahun perencanaan sebesar

71,84. Pada tahun pertama yaitu tahun 2021 nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terealisasi sebesar 64,93, dengan demikian capaian kinerja pada indikator tersebut masih perlu peningkatan pada 6 (enam) sasaran penunjang Indikator Kinerja Utama tersebut.

Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Sekadau tahun 2021 adalah sebesar 98,86 persen atau berkinerja baik, target indeks Pembangunan Gender sebesar 83.87 dan terealisasi sebesar 82.92.

Sebagai Langkah dan inovasi untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Gender (IDG) yaitu :

a. Semua Pembangunan gender mempunyai faktor pendukung yang meliputi pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang meliputi gender laki-laki dan perempuan yang melibatkan lintas SKPD sehingga pengukuran dan perhitungan terkait dengan BPS provinsi;
b. Pelibatan seluruh steakholder untuk menghilangkan anggapan bahwa perempuan kodratnya hanya sebagai pengurus rumahtangga dan bukan sebagai penunjang kebutuhan keluarga;
c. Mendorong perempuan agar meningkatkan kapasitasnya dan ikut serta dalam proses pembangunan masyarakat;
d. Memberikan bimbingan dan pelatihan disegala bidang tentang pentingnya peran serta perempuan dalam membangun keluarga
e. Sinergitas dan optimalisasi program kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak lintas sektoral.

Tabel 2.3.2.2

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No.		Tujuan / Sasaran Strategis / Program	Anggaran (Rp)			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
2.		***Meningkatkan derajat kualitas sumber daya manusia***	179.186.966.098	131.149.812.922	73%	100,26%	136,98%
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	81.716.353.955	66.107.015.564			
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	7.425.780.900	6.359.659.483			
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	462.241.919	240.574.300			
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	151.385.842	149.012.000			
		Program Pengendalian Penduduk	7.000.000	600.000			
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2.062.584.869	1.165.292.100			
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	0				
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	528.443.426	479.159.100			
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	663.033.950	655.254.200			
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	3.194.827.654	3.149.523.700			
		Program Pengelolaan Pendidikan	81.266.142.369	51.403.531.699			
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	0				
		Program Pembinaan Perpustakaan	207.626.500				
		Program Pelestarian Koleksi Nasioanal Dan Naskah Kuno	0				
		Progam Pemberdayaan Sosial	226.544.896	182.491.700			
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	1.129.774.222	1.128.064.276			
		Program Perlindungan Perempuan	41.433.658	37.524.200			
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	0				
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	12.294.150	11.293.700			
		Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	91.497.788	80.816.900			
		Program Perlindungan Khusus Anak	0				

Dengan memperhatikan tabel diatas, realisasi anggaran yang diserap guna mendukung meningkatkan derajat kualitas sumberdaya manusia mencapai 73% dari target anggaran yang tersedia. Dengan tingkat efisiensi sebesar 136,98 % .

Tabel 2.3.2.3

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan target Akhir RPJMD

NO		Tujuan/Sasaran Strategis	IKU	Satuan	KINERJA TAHUN 2021			Target Akhir RPJMD
					Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
II		***Meningkatkan derajat kualitas sumber daya manusia***	***Indeks Pembangunan Manusia (IPM)***		***64,76***	***64,93***	***100,26%***	***67,56***
	1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup		71,84	72,05	***100,29%***	
	2	Meningkatnya Kualitas Pemuda	Indeks Pembangunan pemuda		n/a	n/a	***0,00%***	
	3	Meningkatnya prestasi keolahragaan	Indeks pembangunan keolahragaan		35,71	14,67	***41,08%***	
	4	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah		11,9	11,89	***99,92%***	
			Rata-rata lama sekolah		6,86	6,85	***99,85%***	
	5	Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Masyarakat	Pengeluaran Penduduk Per Kapita		7434	7462	***100,38%***	
	6	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		83,87	92,92	***110,79%***	

2.3.3. Analisis Capaian Kinerja Tujuan 3 Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Dasar serta Kualitas Lingkungan Hidup

Capaian Misi 3 Kabupaten Sekadau dengan Tujuan Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Dasar serta Kualitas Lingkungan Hidup yang direpresentasikan melalui IKU Indeks Infrastruktur dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan tujuh sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 2.3.3.1

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2021

Indikator Tujuan/Sasaran		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Tujuan 3 : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Dasar serta Kualitas Lingkungan Hidup					
1.	**Indeks Infrastruktur**	Indeks	**54,2**		
Sasaran Strategis 16 : Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Infrastruktur Jalan					
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang	%	50,16	50,16	**100,0%**

Sasaran Strategis 17 :Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air					
1	Jumlah rumah yang terakses air bersih	Jumlah	36.317		
2	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	59,64		
Sasaran Strategis 18 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman					
1	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	61,4	61,4	**100,0%**
2	Persentase luasan pemukiman kumuh di kawasan Perkotaan	%	24	4,13	**17,2%**
Sasaran Strategis 19 : Meningkatnya Pelayanan, Konektivitas dan Keselamatan Jaringan Transportasi					
1	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	%	65		
2	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	%	0,19		
Sasaran Strategis 20 : Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik					
1	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	%	80	100	**125,0%**
Sasaran Strategis 21 : Meningkatnya Akses Terhadap Permukiman yang layak huni					
1	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	80	88,97	**111,2%**
Tujuan 3 :Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Dasar serta Kualitas Lingkungan Hidup					
2	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**Indeks**	**63,93**		**0,0%**
Sasaran Strategis 22 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketaatan Rencana Tata Ruang					
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	51	50	**98,0%**
2	Indeks Kualitas udara (IKU)	Indeks	94	97,09	**103,3%**
3	Indeks Kualitas tutupan lahan (IKL)	Indeks	30,56	29,42	**96,3%**
4	Luasan RTH sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	20		

Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur dan Aksesbilitas Pemerintah Daerah diukur dengan Indikator Kinerja Utama Yaitu Proporsi Jalan dalam Kondisi Baik dan sedang, dengan target 50,16 persen dengan realisasi sebesar 50,16 persen dengan demikian capaian kinerja nya mencapa 100 persen. Kondisi ini tidak terlepas dari keterbatasan anggaran yang dialokasikan dalam Anggaran daerah dan faktor panjang jalan kabupaten yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten.

Disamping indikator Proporsi Jalan dalam Kondisi Baik dan sedang, dari tabel di atas dapat dilihat target cakupan lingkungan yang sehat dana man yang didukung dengan PSU dengan target 61,4 persen terealisasi sebesar 61,4 persen dengan capaian sebesar 100 persen. Disamping itu persentase luasasn permukiman kumuh di kawasan perkotaan denagn target 24 persen terealisasi sebesar 4,13 % dengan capaian sebesar 17,21 persen. Capaian kinerja tersebut menunjukan bahwa pemerintah daerah yang cukup baik.

Indikator lain yang menjadi alat ukur untuk Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Dasar serta Kualitas Lingkungan Hidup yang menjadi sasaran strategis pemerintah daerah yakni Peningkatan pelayanan, konektifitas dan keselamatan jaringan transportasi dengan indicator Rasio konektifias kabupaten/ kota dengan target 65 persen dan V/C Ratio di jalan Kabupaten/Kota. Untuk indikator tersebut tidak dapat diukur capaian nya di sebakan karena tidak tersedianya data realisasi.

Disamping itu, indikator lain yang menjadi alat ukur untuk Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur dan Aksesbilitas Pemerintah Daerah yang menjadi sasaran strategis pemerintah daerah yakni Meningkatnya keterbukaan informasi public dengan indikator Indeks Keterbukaan Informasi Publik dengan target sebesar 80 persen dan terealisasi sebesar 100 persen dengan capaian sebesar 125 persen.

Indikator lain yang menjadi alat ukur untuk Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Dasar serta Kualitas Lingkungan Hidup dengan Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang yang diukur dengan Indikator Yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu : Indeks Kualitas Air (IKA) : Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas

Tutupan Lahan (IKTL), yang dapat dilihat pada tabel diatas. Capaian indikator Indek kualitas Air (IKA) dengan target 51 terealisasi sebesar 50 dengan capaian 98 persen, dan indikator Indek kualitas Udara (IKU) dengan target 94 terealisasi sebesar 97,09 dengan capaian 103,3 persen dan indikator Indek kualitas Tutupan Lahan (IKL) dengan target 30,56 terealisasi sebesar 29,42 dengan capaian 96,3 persen.

Tabel 2.3.3.2

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No.		Tujuan / Sasaran Strategis / Program	Anggaran (Rp)			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
3	a	***Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Dasar serta Kualitas Lingkungan Hidup***	119.305.633.153	115.531.994.774	97%	n/a	n/a
		Program Penyelenggaraan Jalan	40.745.105.483	40.023.300.268	98%		
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).	9.847.335.588	8.604.931.700	87%		
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	8.183.098.800	7.288.418.800	89%		
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU).	43.497.307.121	43.347.436.674	100%		
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	4.737.956.302	4.706.402.691	99%		
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ).	937.765.617	883.215.000	94%		
		Program Pengelolaan Pelayaran	1.076.360.800	841.911.900	78%		
		Program Informasi Dan Komunikasi Publik	379.167.333	367.140.542	97%		
		Program Pengembangan Perumahan.	85.740.691	81.656.800	95%		
		Program Kawasan Permukiman.	307.910.202	304.133.999	99%		
	b	***Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Dasar serta Kualitas Lingkungan Hidup***					
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup.	0		0%		
		Program Pengendalian Pencemaran Dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup.	121.167.700	119.926.700	99%		
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati).	930.389.942	908.543.955	98%		
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3).	49.804.109	49.256.800	99%		
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).	187.382.717	185.494.423	99%		
		Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH.	5.900.903	5.900.600	100%		
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.	0		0%		
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.	0		0%		
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.	45.412.641	45.103.960	99%		
		Program Pengelolaan Persampahan.	1.889.106.096	1.862.277.660	99%		
		Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	362.278.596	275.929.000	76%		
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2.496.216.414	2.207.628.700	88%		
		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	115.126.108	93.054.720	81%		
		Program Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0	205.086.490	0%		
		Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	0		0%		
		Program Penataan Bangunan Gedung	1.752.512.686	1.749.021.500	100%		
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	0		0%		
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	157.100.749	75.759.942	48%		
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.395.486.555	1.300.461.950	93%		

Dengan memperhatikan tabel diatas, realisasi anggaran yang diserap guna mendukung Meningkatkan ketersediaan infrastruktur

dasar serta kualitas lingkungan hidup mencapai 97 % dari target anggaran yang tersedia.

Tabel 2.3.3.3

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan target Akhir RPJMD

NO		Tujuan/Sasaran Strategis	IKU	Satuan	KINERJA TAHUN 2021			Target Akhir RPJMD
					Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
III	*a*	***Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Dasar serta Kualitas Lingkungan Hidup***	***Indeks Infrastruktur***	***Nilai***	***54,2***	***n/a***	***n/a***	***61,02***
	1	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Infrastruktur Jalan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang	%	50,16	50,16	100,00%	
	2	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air	Jumlah rumah yang terakses air bersih	Jlh	36317			
			Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	59,64			
	3	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU		61,4	61,4	100,00%	
			Persentase luasan pemukiman kumuh di kawasan Perkotaan	%	24	4,13	17,21%	
	4	Meningkatnya Pelayanan, Konektivitas dan Keselamatan Jaringan Transportasi	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota		65			
			V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota		0,19			
	5	Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik		80	100	125,00%	
	6	Meningkatnya Akses Terhadap Permukiman yang layak huni	Cakupan ketersediaan rumah layak huni		80	88,97	111,21%	
	b	***Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Dasar serta Kualitas Lingkungan Hidup***	***Indeks Kualitas Lingkungan Hidup***	***Nilai***	***63,93***	***n/a***	***n/a***	
	7	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketaatan Rencana Tata Ruang	Indeks Kualitas Air (IKA)		51	50	98,04%	
			Indeks Kualitas udara (IKU)		94	97,09	103,29%	
			Indeks Kualitas tutupan lahan (IKL)		30,56	29,42	96,27%	
			Luasan RTH sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	20			

2.3.4. Analisis Capaian Kinerja Tujuan 4 Meningkatkan Perekonomian Masyarakat

Capaian Misi 4 Kabupaten Sekadau dengan Tujuan Meningkatkan Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang direpresentasikan melalui IKU Pertumbuhan ekonomi, Angka Kemiskinan dan Indeks gini dengan empat sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 2.3.4.1

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2021

Indikator Tujuan/Sasaran		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Tujuan 4 : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat					
1	**Pertumbuhan Ekonomi**	**%**	**1,23**	4,31	350,41%
Sasaran Strategis 23 :Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan					
1	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	3,88	5,65	145,62%
2	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor	%	1,05	3,75	357,14%
3	Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	%	1,52	3,68	242,11%
4	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	*	n/a	n/a
5	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Milyar Rp.	328,27	n/a	n/a
Sasaran Strategis 24 : Meningkatnya Perekonomian Sektor Koperasi dan UMKM					
1	Presentase Pertumbuhan Koperasi dan UMKM	%	2,07	3,58	172,95%
Tujuan 4 :Meningkatkan Perekonomian Masyarakat					
2	**Angka Kemiskinan**	**%**	**5,67**	6,26	110,41%
Sasaran Strategis 25 : Meningkatnya Pemberdayaan, Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial Masyarakat					
1	Persentase Pemberdayaan Sosial	%	20	0	0,00%
2	Persentase PPKS yang Mendapatkan Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial	%	39,18	35	89,33%
Tujuan 4 :Meningkatkan Perekonomian Masyarakat					
3	**Indeks Gini**	**Indeks**	0,298	0,28	93,96%
Sasaran Strategis 26 : Menurunnya Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk					

1	Indeks Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	Indeks	0,298	0,28	93,96%

Kinerja perekonomian Kabupaten Sekadau tahun 2021 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat digambarkan oleh pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010, yang mengalami perbaikan. Pada Tahun 2020 mengalamai kontraksi sebesar 0,98 persen. Pada Tahun 2021 naik menjadi sebesar 4,31 persen. Kinerja perekonomian ini mengalami kenaikan dibandingakan dengan dengan kondisi tahun – tahun sebelumnya yang sempat tumbuh sebesar 5,45 persen. Hal ini tidak terlepas dari dampak pandemi COVID-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020.

Laju pertumbuhan PDRB yang mengalami perlambatan pada tahun 2020 dan kembali naik pada tahun 2021 ternyata juga terjadi pada mayoritas lapangan usaha (sector ekonomi). Namun demikian, terdapat beberapa lapangan usaha yang mengalami perecepatan pertumbuha ekonomi di masa pandemi. Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2020 dicapai oleh lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan pertumbuhan sebesar 10,94 persen, diikuti lapangan usaha Informasi dan komunikasi dengan pertumbuhan sebesar 8,26 persen dan lapangan usaha pengadaan listrik dan gas dengan pertumbuhan sebesar 7,65 persen. KOnsdisi normal baru sejak adanya pandemi COVID-19 membuat permintaan akan jasa kesehatan meningkat. Penerapan *work from home* dan *school from home* diduga juga meningkatkan permintaan akan produk – produk informasi dan komunikasi. Selain itu, dengan semakin lamanya durasi seseorang berada dalam rumah ketika masa pandemi, penggunaan listrik pun juga semakin meningkat.

Bila dicermati lebih lanjut dari penciptan sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sekadau pada tahun 2021, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan perikanan memiliki sumber pertumbuhan sebesar 5,65 persen, diikuti dengan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, reparasi mobi dan sepeda

motor sebesar 3,75 persen dan diikuti lapangan usaha industry pengolahan sebesar 3,68 persen.Ditenganh masa pandemi ini, lapangan usaha yang menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sekadau Thun 2021 mengalami perbaikan dari tahun – tahun sebelumnya.

Dari data analisis oleh BPS Kabupaten Sekadau pertumbuhan ekonomi menurut komponen pengeluaran, dua komponen yang memiliki andil paling besar bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sekadau pada tahun 2020 adalam komponen impr dengan sumber pertumbuhan sebesar 0,24 persen dan komponen konsumsi pemerintah dengan sumber pertumbuhan sebesar 0,11 persen. Komponen tersebut belumpernah menjadi penyumbang terbesar pada sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sekadau pada tahun – tahun sebelumnya.

Struktur Ekonomi Kabupaten Sekadau menurut Lapangan Usaha pada tahun 2020 didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan besaran kontribusi sebesar 39,77 persen, kemudian diikuti oleh Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi sebesar 12,90 persen dan Lapangan Usaha Kontstruksi sebagai contributor terbesar ketiga yakni dengan kontribusi sebesar 11,89 persen.

Jika PDRB menurut lapangan usaha dapat menggambarkan besaran Nilai Tambah yang diciptakan dalam ruang lingkup regional, serta menggambarkan struktur ekonomi berdasarkan kontribusi sectoral, PDRB menurut pengeluaran menggambarkan struktur perekonomian regional berdasarkan permnitaan akhir tiap komponen dalam system perekonomian terbuka.

Garis kemiskinan menunjukkan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok non makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata

pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin

Pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) diKabupaten Sekadau mencapai 12,69 ribu orang (6,26 persen),bertambah jika dibandingkan dengankondisi 2020 yang sebesar 11,92 ribu orang (5,87 persen).•Garis kemiskinan pada tahun 2020 sebesar Rp 339.456 perkapita/bulan selanjutnya naik menjadi Rp 351.726 perkapita/bulan pada tahun 2021.•Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) maupun Indeks KeparahanKemiskinan (P2) menunjukkan kenaikan pada periode 2020-2021.P1 pada tahun 2021 (0,78) mengalami kenaikan dari tahun 2020(0,58). P2 juga mengalami kenaikan yaitu dari tahun 2020sebesar 0,10 menjadi 0,14 pada tahun 2021 yang berartiketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin menjadi sedikit bertambah.

Pada periode 2019 – 2021 tingkat kemiskinan di Kabupaten Sekadau mengalami penurunan dan, pada Maret 2021 Kabupaten Sekadau mengalami kenaikan dan mencapai tingkat tertinggi selama empat tahun terakhir baik itu secara jumlah penduduk maupun secara persentase. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sekadau pada Maret 2021 mencapai 12,69 ribu orangdengan presentase 6,26. Terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin jika dibandingkan dengan Maret 2020 yang sebesar 11,92 ribu orang dengan presentase 5,87

Perkembangan tingkat kemiskinan Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 ditunjukkan oleh Gambar berikut :

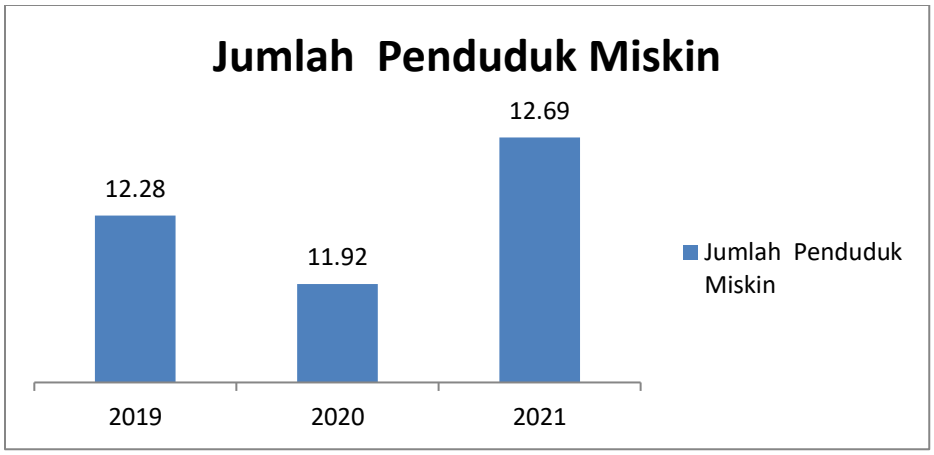

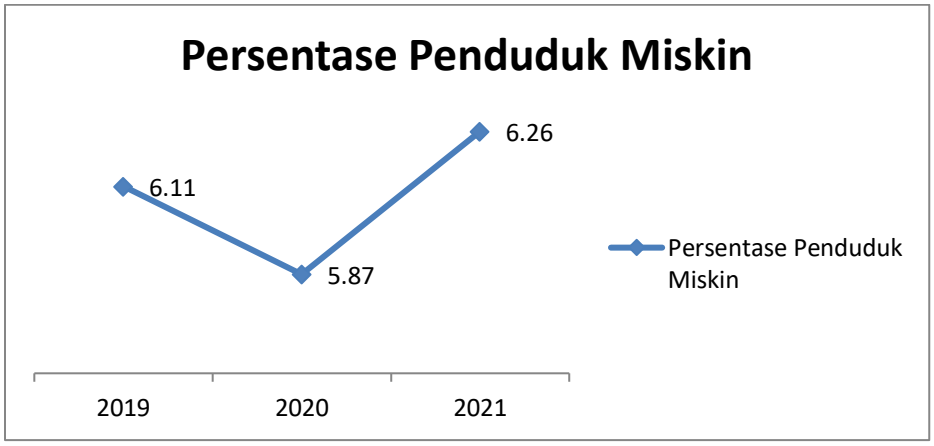

Koefisien gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini berniali 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Sekadau Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 ditunjukkan oleh Gambar berikut :

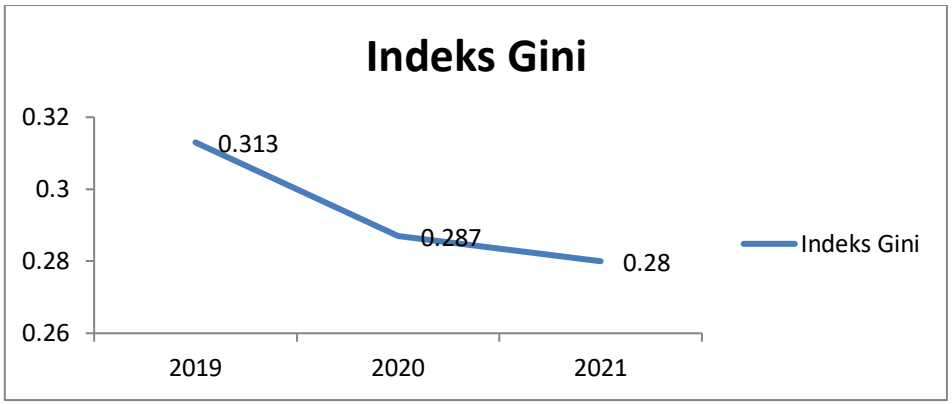

Tabel 2.3.4.2

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No.		Tujuan / Sasaran Strategis / Program	Anggaran (Rp)			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
4	a	***Meningkatkan Perekonomian Masyarakat***	21.615.281.872	9.888.565.329	46%	350,41%	765,96%
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	7.416.126.417	2.842.915.130	38%		
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	8.912.769.260	58.635.099	1%		
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	59.583.842	58.635.099	98%		
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	0		0%		
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	0	1.328.707.274	0%		
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	200.201.636	188.834.000	94%		
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	72.430.115	67.136.500	93%		
		Program Pengembangan Ekspor	0		0%		
		Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	116.454.332	111.462.000	96%		
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	0	0	0%		
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri.	110.035.350	108.066.000	98%		
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	0	0	0%		
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	61.087.550	60.540.900	99%		
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	24.350.997	24.339.200	100%		
		Program Promosi Penanaman Modal	0		0%		
		Program Pelayanan Penanaman Modal	317.139.336	311.478.250	98%		
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	438.060.801	423.151.200	97%		
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	-	0	0%		
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	211.977.900	209.298.200	99%		
		Program Pemasaran Pariwisata	146.230.320	138.441.500	95%		
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	0		0%		
		Program Perekonomian dan Pembangunan	174.345.080	887.953.470	509%		
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam.	0		0%		
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi.	78.427.793	73.835.500	94%		
		Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	0		0%		
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian.	188.703.518	186.579.000	99%		
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi.	54.573.600	50.943.000	93%		
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil,	639.274.973	616.634.900	96%		
		Program Pengembangan UMKM.	919.333.368	891.692.571	97%		
	b	***Meningkatkan Perekonomian Masyarakat***					
		Program Rehabilitasi Sosial	150.066.398	146.758.050	98%		
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	148.221.988	140.703.016	95%		
		Program Penanganan Bencana	430.770.450	73.872.000	17%		
	c	***Meningkatkan Perekonomian Masyarakat***					
		Program Perekonomian dan Pembangunan	745.116.848	887.953.470	119%		

Dengan memperhatikan tabel diatas, realisasi anggaran yang diserap guna mendukung Meningkatkan perekonomian masyarakat mencapai 46 % dari target anggaran yang tersedia.

Tabel 2.3.4.3

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan target Akhir RPJMD

NO		Tujuan/Sasaran Strategis	IKU	Satuan	KINERJA TAHUN 2021			Target Akhir RPJMD
					Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
IV	a	***Meningkatkan Perekonomian Masyarakat***	***Pertumbuhan Ekonomi***		***1,23***	***4,31***	***350,41%***	***5,02***
	1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan		3,88	5,65	145,62%	
			Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan besar		1,05	3,75	357,14%	
			Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan		1,52	3,68	242,11%	
			Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB		*	n/a	n/a	
			Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)		328,27	n/a	n/a	
	2	Meningkatnya Perkonomian Sektor Koperasi dan UMKM	Presentase Pertumbuhan Koperasi dan UMKM		2,07	3,58	172,95%	
	b	***Meningkatkan Perekonomian Masyarakat***	***Angka Kemiskinan***		***5,67***	***6,26***	***110,41%***	***4,67***
	3	Meningkatnya Pemberdayaan, Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial Masyarakat	Persentase Pemberdayaan Sosial		20	n/a	n/a	
			Persentase PPKS yang Mendapatkan Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial		39,18	35	89,33%	
	c	***Meningkatkan Perekonomian Masyarakat***	***Indeks Gini***		***0,298***	***0,280***	***93,96%***	***0,286***
	4	Menurunnya Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk	Indeks Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)		0,298	0,280	93,96%	

2.3.5. Analisis Capaian Kinerja Tujuan 5 Meningkatkan Kesejahteraan Petani dan Buruh

Salah satu indikator kesejahteraan petani adalah Nilai Tukar Petani (NTP) yang menggambarkan tingkat kesejahteraan relatif petani. Perhitungan NTP diperoleh dari perbandingan antara indeks harga yang diterima petani terhadap indek harga yang dibayar petani. NTP juga mengukur daya tukar produk pertanian terhadap barang dab jasa yang dikonsumsi maupun biaya produksi. Semakin tinggi NTP akan menunjukan semakin tinggai tingkat kesejahteraan petani.

Capaian Misi 5 Kabupaten Sekadau dengan Tujuan Meningkatkan Kesejahteraan petani dan buruh yang direpresentasikan melalui IKU Nilai Tukar Petani mencapai realisasi kinerja yang cukup baik yakni sebesar 102,87 persen dari target sebesar 101,2 dengan capaian 101.7%.

Tabel 2.3.5.1

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2021

	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Tujuan 5 : Meningkatkan kesejahteraan petani dan buruh					
1	**Nilai Tukar Petani**	**Nilai**	**101,2**	102,87	**101,7%**
Sasaran Strategis 27 : Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Buruh					
1	NTP Tanaman Pangan	%	96,43	96,92	**100,5%**
2	NTP Tanaman Hortikultura	%	94,44	104,83	**111,0%**
	NTP Perkebunan Rakyat	%	108,17	114,66	**106,0%**
3	NTP Peternakan	%	97,19	97,55	**100,4%**
4	NTP Perikanan	%	94,87	98,22	**103,5%**
Sasaran Strategis 28 : Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat					
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	77	73,13	**95,0%**
Tujuan 5 : Meningkatkan kesejahteraan petani dan buruh					
2	**Tingkat Pengangguran Terbuka**	**Nilai**	**101,2**	2,92	**2,9%**
Sasaran Strategis 29 : Meningkatnya penyerapan tenaga kerja					
1	Rasio Tenaga Kerja yang ditempatkan	Rasio	26,18		**0,0%**

Dari tabel diatas NTP Kabupaten Sekadau pada akhir tahun 2020 menunjukan angka 102,87 yang menunjukan bahwa tingkat kesejahteraan nya berada diatas batas sejahtera (100). Demngan demikian NTP yang merupakan indikator kinerja utama (IKU) pada tujuan 5 yakni meningkatkan kesejateraan petani dan buruh menunjukkan capaian kinerja sebesar 101,7 persen.

Capaian kinerja tersebut ditunjang oleh beberapa indikator sasaran yang terdiri dari 5 (lima) indikator yakni NTP Tanaman Pangan, NTP tanaman hortikultura, NTP Perkebunan Rakyat, NTP Peternakan dan NTP Perikanan dengan angka rata – rata di atas 100.

Berdasarkan data yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021-2026, kondisi awal tahun perencanaan sebesar 95,63 persen. Pada tahun pertama yaitu tahun 2021 Nilai Tukar Petani (NTP) terealisasi sebeesar 102,87, dengan demikian capaian kinerja NTP cukup baik.

Tabel 2.3.5.2

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No.		Tujuan / Sasaran Strategis / Program	Anggaran (Rp)			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
5	a	***Meningkatkan kesejahteraan petani dan buruh***					
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	94.872.787	94.370.200	99%	101,65%	102,19%
		Program Perizinan Usaha Pertanian	56.873.650	56.697.250	100%		
		Program Penyuluhan Pertanian	12.527.400	12.432.400	99%		
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan		0			
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.342.463.120	1.328.707.274	99%		
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	869.034.220	864.022.005	99%		
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	3.480.900	2.785.000	80%		
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	0	0	0%		
	b	***Meningkatkan Perekonomian Masyarakat***					
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	43.344.944	43.344.944	100%		
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	0		0%		
		Program Penempatan Tenaga Kerja	32.774.629	32.315.400	99%		
		Program Hubungan Industrial	34.258.278	34.148.900	100%		

Dengan memperhatikan tabel diatas, realisasi anggaran yang diserap guna mendukung Meningkatkan kesejahteraan petani dan

buruh mencapai 99 % dari target anggaran yang tersedia dengan tingkat efisiensi sebesar 102,19 %.

Tabel 2.3.5.3

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan target Akhir RPJMD

NO		Tujuan/Sasaran Strategis	IKU	Satuan	KINERJA TAHUN 2021			Target Akhir RPJMD
					Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
V	a	***Meningkatkan kesejahteraan petani dan buruh***	***Nilai Tukar Petani***		***101,2***	***102,87***	***101,65%***	***104,2***
	1	Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Buruh	NTP Tanaman Pangan		96,43	96,92		
			NTP Tanaman Hortikultura		94,44	104,83		
			NTP Perkebunan Rakyat		108,17	114,66		
			NTP Peternakan		97,19	97,55		
			NTP Perikanan		94,87	98,22		
	2	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan		77	n/a	n/a	
	b	***Meningkatkan Perekonomian Masyarakat***	***Indeks Ketahanan Pangan***					
	3	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Rasio Tenaga Kerja yang ditempatkan		26,18	n/a	n/a	

2.3.6. Analisis Capaian Kinerja Tujuan 6 Melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan daerah

Pembangunan masyarakat diselenggarakan atas dasar prinsip-prinsip keterpaduan, keberlanjutan, keserasian, kemampuan sendiri kaderisasi. Prinsip keterpaduan mengandung arti bahwa program atau kegiatan pembangunan masyarakat disusun bersama untuk masyarakat atas dasar kebutuhan dan berbagai sumber yang tersedia untuk memenuhi kepentingan bersama dalam aspek kehidupan. Prinsip keberlanjutan, memberi arah bahwa pembangunan masyarakat itu tidak dilakukan sekaligus. Melainkan bertahap dan terus menerus menuju kearah yang lebih baik. Program yang telah berhasil merupakan titik awal untuk program berikutnya

sedangkan suatu program yang perlu diperbaiki dan dikembangkan menurut adanya kegiatan lanjutan. Prinsip keserasian, mengandung makna bahwa program pembangunan masyarakat memperhatikan keserasian antara kebutuhan terasa yang diyatakan oleh perorangan, lembaga-lembaga dan pemerintah. Keserasian ini pun tercermin dalam kegiatan yang bertumpu pada kepentingan rakyat banyak dan pemerintah. Kegiatan dan sasarannya mengarah pada terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohaniah serta keseimbangan dalam seluruh aspek hidup dan kehidupan. Keserasian itupun tercermin dalam kegiatan yang bertumpu pada kepentingan rakyat banyak dan pemerintah.

Tabel 2.3.6.1

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2021

Indikator Tujuan/Sasaran		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Tujuan 6 : Melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan daerah					
1	**Indeks desa membangun kategori desa mandiri**	**Jumlah Desa Mandiri**	**16**	16	100%
Sasaran Strategis 30 : Meningkatnya Jumlah Status Desa Mandiri di Kabupaten Sekadau					
1	Persentase desa mandiri	%	18	18	100%
Sasaran Strategis 31 : Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah					
1	Persentase Tingkat partisipasi Masyarakat	%	70	60	86%
Sasaran Strategis 32 : Meningkatnya kemampuan daerah dalam menghadapi bencana dan kualitas pelayanan bencana kebakaran					
1	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten	Indeks	100	100	100%
2	Tingkat waktu tanggap (*respone time rate*) daerah layanan wilayah manjemen kebakaran(WMK)	Menit	31	31	100%

Capaian Kinerja Tujuan startegis 6 yakni Melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan daerah dengan Indikator Indeks desa membangun kategori desa mandiri Kabupaten Sekadau Tahun 2021 sebesar 100% atau berkinerja baik, pencapaian kinerja

ini didapat dari target yang ditetapkan sebesar 16 desa mandiri dan terealisasi sebesar 16 desa mandiri pada tahun 2021.

Berdasarkan dari tiga indikator sasaran strategis pembentuk Indeks desa membangun kategori desa mandiri Kabupaten Sekadau seperti tabel di atas bahwa Persentase desa mandiri dengan capaian kinerja sebesar 100%, Persentase Tingkat partisipasi Masyarakat dengan capaian sebesar 86%, Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten dengan capaian kinerja sebesar 100% serta Tingkat waktu tanggap (respone time rate) daerah layanan wilayah manjemen kebakaran(WMK) dengan capaian kinerja sebesar 100% dan ini perlu terus ditingkatkan agar di tahun tahun mendatang semakin baik lagi.

Langkah dan program Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Sekadau sebagai kategori desa Mandiri yaitu :

a. Meningkatnya Ketahanan ekonomi Masyarakat desa dengan program pengembangan Usaha ekonomi perdesaan;
b. Meningkatnya ketahanan Sosial masyarakat desa dengan program peningkatan Keberdayaan masyarakat;
c. Meningkatnya akuntabilitas Penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan program peningkatan Kualitas penyelenggaran Pemerintahan desa

Strategi yang dilakukan dakam rangka pencegahan dan penanganan bencana antara lain :

a. Melaksanakan peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya bencana lewat penyuluhan pencegahan bencana.
b. Pelaksanaan pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana). Destana adalah sebuah konsep membangun komunitas sadar bencana yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Sekadau untuk mengurangi / mengantisipasi resiko dampak bencana. Dengan konsep ini telah mengurangi resiko bencana dan menggantikan posisi dari menanggulangi kedaruratan bencana.

c. Terbentuknya tim-tim Relawan Peanggulangan Bencana di Kawasan Rawan Bencana.

d. Melaksanakan kegiatan ATC 247 (Aksi Tanggap Cepat dalam 24 jam selama 7 hari). ATC 247 merupakan kegiatan dalam kesiapan menanggulangi bencana dalam 24 jam selama 7 hari secara terus menerus.

e. Pemerintah daerah telah membuat langkah-langkah preventif untuk menanggulangi terjadinya bencana antara lain :

1. Perbaikan drainase tanah dengan menambah materi-materi yang bisa menyerap air dan memfungsikan sungai serta selokan sebagaimana mestinya. Sungai dan selokan adalah tempat aliran air, jangan sampai fungsinya berubah menjadi tempat sampah;
2. Memperbanyak penghijauan yaitu dengan cara membuat hutan-hutan kota dan menanami hutan yang gundul (reboisasi), karena pohon adalah salah satu penopang kehidupan di suatu kota dan desa serta sebagai penyimpan cadangan air dan dapat mencegah tanah longsor (erosi);

Tabel 2.3.6.2

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No.		Tujuan / Sasaran Strategis / Program	Anggaran (Rp)			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
6		***Melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan daerah***	9.397.085.589	8.490.066.829	90%	100%	110,68%
		Program Penataan Desa	201.412.507	144.407.900	72%		
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	0		0%		
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	711.715.594	609.803.090	86%		
		Program Pemeberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	189.079.300	152.862.900	81%		
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	19.227.299	7.292.500	38%		
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	540.926.493	0	0%		
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.339.316.103	1.270.541.065	95%		
		Program Penanggulangan Bencana	5.812.304.546	5.732.316.574	99%		
		Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	583.103.747	572.842.800	98%		

Dengan memperhatikan tabel diatas, realisasi anggaran yang diserap guna mendukung melibatkan masyarakat dalam proses

pembangunan daerah mencapai 90 % dari target anggaran yang tersedia dengan tingkat efisiensi sebesar 110,68 %.

Tabel 2.3.6.3

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan target Akhir RPJMD

NO		Tujuan/Sasaran Strategis	IKU	Satuan	KINERJA TAHUN 2021			Target Akhir RPJMD
					Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
VI		***Melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan daerah***	***Indeks desa membangun kategori desa mandiri***		***16***	***16***	***100%***	***36***
	1	Meningkatnya Jumlah Status Desa Mandiri di Kabupaten Sekadau	Persentase desa mandiri		18	18	100%	
	2	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah	Persentase Tingkat partisipasi Masyarakat		70	60	86%	
	3	Meningkatnya kemampuan daerah dalam menghadapi bencana dan kualitas pelayanan bencana kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten		100	100	100%	
			Tingkat waktu tanggap (respone time rate) daerah layanan wilayah manjemen kebakaran(WMK)		31	31	100%	

2.3.7. Analisis Capaian Kinerja Tujuan 7 Memperkokoh kerukunan kehidupan beragama dan budaya yang berbasis kearifan lokal dan karakteristik masyarakat

Capaian Kinerja Tujuan 7 Memperkokoh kerukunan kehidupan beragama dan budaya yang berbasis kearifan lokal dan karakteristik masyarakat dengan tiga Sasaran Strategis diukur dengan Indikator Kinerja Utama yaitu angka konflik sosial yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3.7.1

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2021

Indikator Tujuan/Sasaran		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Tujuan 7 : Memperkokoh kerukunan kehidupan beragama dan budaya yang berbasis kearifan lokal dan karakteristik masyarakat					
1	**Konflik Sosial**	**Jumlah Kejadian**	**0**	0	100,00%
Sasaran Strategis 33 : Meningkatnya Kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama					
1	Persentase konflik yang di tangani	%	100		0,00%
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	95		0,00%
Sasaran Strategis 34 : Meningkatnya Kesadaran terhadap kesatuan bangsa dan politik					
1	Persentase masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	%	75	76	101,33%
2	Persentase masyarakat yang paham terhadap politik	%	75	75	100,00%
Sasaran Strategis 35 : Meningkatnya kelestarian budaya					
1	Persentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan	%	53,13		0,00%

Dengan melihat potensi konflik dari tahun – tahun sebelumnya tidak ada peningkatan konfik yang terjadi selama 2 (dua) tahun terakhir, yaitu konflik sengketa batas Wilayah Kabupaten Sekadau dengan Desa Sunsong dikecamatan Sekadau Hulu dengan Kabupaten Sintang, namun di tahun 2018. Konflik dan masalah tersebut dapat terselesaikan dengan Surat Ketetapan Gubernur Kaimantan Barat dan Berita Acara Rapat Fasilitasi Penegasan Batas Daerah Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau. Dari tahun 2018 sudah tidak ada konflik dan diharapkan sampai tahun berikutnya tidak ada lagi konflik di Kabupaten Sekadau. Surat Ketetapan Gubernur Kaimantan Barat dan Berita Acara Rapat Fasilitasi Penegasan Batas Daerah Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat dan hasil rapat tersebut bahwa Pemerintah

Kabupaten Sintang dan Pemerintah Kabupaten Sekadau menyatakan Sepakat.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut Adapun penyebab dan latar belakang permasalahan adalah masuknya perusahaan perkebunan di wilayah tersebut dan adanya Pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) dan SD Mini di Dusun Bukong baru Desa Sungsong Kecamatan Sekadau Hulu oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang.

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1) Penegasan dari Gubernur dengan Surat Keputusan Gubernur tentang Batas Wilayah Kabupaten.
2) Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), Dewan Adat Dayak, Melayu, Etnis Cina, Jawa merupakan Media yang sangat penting menjalin kerjasama dan kerukunan masyarakat.

Dengan pembentukan Forum/kelembagaan dan kegiatan pembinaan dalam masyarakat diharapkan dapat memperkuat kelembagaan dalam mengantisipasi potensi konflik dan di dukung oleh Program kemitraan pengawasan kebangsaan, Pengembangan wawasan kebangsaan dan Pemeliharaan kantrantibnas dan pencegahan tindak kriminal dan Program,kegiatan Bupati dan Wakil Bupati dalam menjalin kerukunan masyarakat melaksanakan kegiatan Safari pada hari Raya masing-masing umat.

Diharapkan dengan capaian kinerja 100% dapat dipertahankan dengan Meningkatnya Kerukunan Masyarakat sehingga kerja sama dan kerukunan masyarakat dapat terjalin harmonis, melalui Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), Dewan Adat Dayak, Melayu, Etnis Cina, Jawa merupakan Media yang sangat penting menjalin kerjasama dan kerukunan masyarakat.

Strategi yang dilakukan agar tercipta ketertiban, ketentraman dan keindahan adalah :

f. Untuk menjaga rasa aman tetap terpelihara dengan baik, pemerintah Kabupaten Sekadau telah berkominten dengan masyarakat untuk menjaganya yaitu dengan meningkatkan dan mengoptimalkan citra aparatur Satuan Polisi Pamong Praja menuju profesionalisme pengabdian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga tanggung jawab terhadap masing – masing urusan dapat terpantau, terukur, dan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
g. Melaksanakan kegiatan patroli secara rutin lewat program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, kegiatan pengendalian keamanan lingkungan terlebih pada tempat tempat keramaian dikarenakan pada masa covid-19;
h. Melaksanakan program pemberdayaan dan pengembangan potensi satuan linmas, kegiatan penyuluhan dan pembinaan sebagai antisipasi kemungkinan terjadinya kerusuhan dan kegiatan pengamanan kepada masyarakat dikondisi pandemi covid 19;
i. Melaksanakan program peningkatan penegakan peraturan daerah lewat kegiatan penegakan peraturan;

Tabel 2.3.7.2

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No.		Tujuan / Sasaran Strategis / Program	Anggaran (Rp)			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
7		***Memperkokoh kerukunan kehidupan beragama dan budaya yang berbasis kearifan lokal dan karakteristik masyarakat***	30.759.152.219	30.337.714.748	99%	n/a	n/a
		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	0	0	0%		
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.	0	0	0%		
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.	42.696.494	26.005.700	61%		
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraaan Rakyat	27.384.132.171	27.384.132.171	0%		
		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.199.322.385	1.179.011.527	98%		
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	0	0	0%		
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	48.928.097	42.336.100	87%		
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	913.204.810	774.800.700	85%		
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	146.284.137	70.291.050	48%		
		Program Pengembangan Kebudayaan	924.364.625	763.438.900	83%		
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	0	0			
		Program Pembinaan Sejarah	0	0			
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	100.219.500	97.698.600			

Dengan memperhatikan tabel diatas, realisasi anggaran yang diserap guna mendukung melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan daerah mencapai 99 % dari target anggaran yang tersedia.

Tabel 2.3.7.3

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan target Akhir RPJMD

NO	Tujuan/Sasaran Strategis	IKU	Satuan	KINERJA TAHUN 2021			Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
VII	***Memperkokoh kerukunan kehidupan beragama dan budaya yang berbasis kearifan lokal dan karakteristik masyarakat***	***Konflik Sosial***		***0***	***n/a***	***n/a***	***0***
1	Meningkatnya Kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama	Persentase konflik yang di tangani		100	n/a	n/a	
		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)		95	n/a	n/a	
2	Meningkatnya Kesadaran terhadap kesatuan bangsa dan politik	Persentase masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa		75	76	101%	
		Persentase masyarakat yang paham terhadap politik		75	75	100%	
3	Meningkatnya kelestarian budaya	Persentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan		53,13	n/a	n/a	